BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Meraih kemenangan pada Pemilu Presiden tahun 2004 lalu menjadikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menduduki kursi Presiden-Wakil Presiden dalam masa jabatan tahun 2004-2009. Untuk memulai tugas pemerintahannya, duo SBY-JK mengawali dengan membentuk kabinet yang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu. Di samping pembentukan kabinet, presiden juga membentuk staf khusus kepresidenan diantaranya Sudi Silalahi sebagai sekretaris kabinet; Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal sebagai juru bicara kepresidenan; Brigjend Kurdi Mustafa sebagai sekretaris pribadi; Irvan Eddyson, Sardan Marbun, Heru Lelono, dan Yeni Wahid sebagai staf pribadi presiden.

Setelah dibantu oleh sejumlah staf khusus kepresidenan tersebut yang menangani berbagai bidang, kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membentuk sebuah unit kerja presiden baru yang dinamai Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Unit kerja presiden ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tertanggal 29 September 2006 dengan masa kerja selama tiga tahun, dan diketuai oleh Marsillam Simandjuntak dengan dibantu oleh dua orang deputi yakni Letjen (Purn) Agus Widjojo dan Edwin Gerungan.

> "UKP3R adalah perangkat Presiden yang bekerja langsung di bawah Presiden, yang akan menjadi mata dan telinga Presiden dalam menjalankan program - program serta tugasnya sehari – hari". UKP3R akan melakukan

program - program pemerintahan. Pada dasarnya, UKP3R akan membantu presiden dalam mengawasi kinerja pemerintahan sehari - hari dan memberikan laporan langsung dari lapangan. "Selain itu, tim yang baru dibentuk ini juga akan memberikan masukan solusi serta rekomendasi yang tepat sasaran kepada presiden" (http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2006/10/26/1182 , 26 Oktober 2006).

UKP3R adalah unit kerja yang diperlukan oleh presiden agar dalam menjalankan tugas-tugasnya semua program dan semua agenda bisa berjalan dengan baik, dan bisa tepat waktu dijalankan. UKP3R sangat dibutuhkan mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi presiden (Kompas, 1 November 2006).

Dasar Pembentukan UKP3R :

Kronologi:

- **16 Mei 2005**
  KPK menyampaikan Program Reformasi Birokrasi kepada presiden.
  Dengan alasan :
  1. Kualitas birokrasi Indonesia tidak sepadan dengan tingkat perkembangan pembangunan
  2. Integritas aparatur birokrasi berada di bawah tingkat yang didambakan publik
  3. Kepastian hukum sering diabaikan sehingga korupsi merajalela
  4. Mutu pelayanan publik jauh di bawah harapan
- **20 Juni 2006**
  KPK menyampaikan surat kepada presiden untuk membentuk tim kepresidenan dan menyarankan implementasi lanjutan reformasi birokrasi di peradilan, lingkungan penegakan hukum, sektor penerimaan negara (BPN, BUMN, dll) dan sektor perizinan
- **29 September 2006**
  Terbit Keppres RI No. 17 Tahun 2006 dengan tugas :
  Pasal 3 Ayat 2
  a. Perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya
  b. Pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan
  c. Peningkatan kinerja BUMN
  d. Perluasan peranan UKM
  e. Perbaikan penegakan hukum

(Media Indonesia, 7 November 2006)

Untuk menguatkan posisi UKP3R sebagai tim kerja khusus pembantu presiden, kemudian dijabarkan beberapa fungsi dan peranan UKP3R dalam kewenangannya membantu tugas-tugas presiden.

> Fungsi UKP3R antara lain membantu presiden menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, membantu presiden menemukan kelemahan dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya, menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, UKP3R ditugaskan memantau dan menganalisis kelemahan pelayanan publik yang terjadi serta membantu presiden menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan pembaruan tata kelola pemerintahan. (http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/marsillam-simanjuntak/index.shtml , 4 November 2006).

> UKP3R dibentuk untuk memastikan implementasi program kerja presiden yang belum membawa hasil dalam dua tahun pemerintahannya, seperti pengurangan rakyat miskin dan penciptaan lapangan kerja. Seperti disadari Presiden sendiri, implementasi kerap menjadi masalah. Masalah pada implementasi ini membuat Indonesia dilihat tidak berubah oleh mereka yang ingin berinvestasi (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/30/Politikhukum/3055264.htm , 30 Oktober 2006).

UKP3R yang dibentuk oleh Presiden SBY tidak selalu memiliki kewenangan berlimpah dalam segala hal. Terlepas dari sederet tugas yang akan diemban, ada empat hal yang bukan menjadi tugas dan kewenangan UKP3R.

> *Pertama,* UKP3R tidak mengambil keputusan dan tidak menetapkan kebijakan pemerintah. *Kedua,* UKP3R tidak memberikan instruksi dan arahan kepada menteri dan anggota kabinet. *Ketiga,* UKP3R tidak melakukan tindakan investigasi atau pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan masalah hukum seperti korupsi. *Keempat,* UKP3R bukan "pos politik" dan pejabatnya tidak dalam kategori *political appointee* seperti menteri, tetapi adalah "pos manajemen" yang jadi perangkat presiden selaku pemimpin eksekutif tertinggi (Kompas, 10 November 2006).

Pembentukan UKP3R ini ternyata mendapat sambutan dingin dari sejumlah pihak dan menuai kontroversi di sejumlah elit politik. *Pertama,* tentang

tersebut, yang kemudian menimbulkan kritik ketidakharmonisan hubungan antara presiden dan wapres.

> Menurut Surya Paloh, "Itu semua tergantung bagaimana presiden mendefinisikan fungsi dan peran wakil presidennya. Kalau wakil presiden hanya sebagai ban serep, ya nggak apa-apa nggak perlu diajak bicara. Dan hal ini merupakan satu masalah yang bisa memberikan dampak politis tertentu, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau masalah tersebut nantinya akan mencuat dalam Rapimnas Golkar, 13 November 2006 mendatang" (http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=115581 , 2 November 2006).

Dan hal tersebut pada akhirnya memicu reaksi keras dari partai Golkar yang merasa tidak diperhitungkan serta disepelekan karena tidak adanya konsultasi antara presiden dan wapres mengenai pembentukan UKP3R tersebut. Merupakan respon yang wajar karena para aktivis Golkar merasa *surprised* ketika wapres yang notabene Ketua Umum Golkar justru tidak tahu menahu dengan ide pembentukan unit kerja tersebut. Puncaknya, Golkar berniat akan mereposisi sikap partainya terhadap pemerintahan SBY. Jika pada awal pemerintahan SBY-JK Golkar memposisikan diri sebagai partai pendukung pemerintah, namun karena persoalan *miscommunication* tersebut Golkar merasa perlu untuk mengevaluasi dukungannya terhadap SBY.

> "Posisi partai Golkar sebagai pendukung pemerintah sangat menyulitkan partai dalam bersikap terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan. Di satu sisi Golkar harus mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun di sisi lain kepentingan Golkar sangat kurang diakomodasi. Itulah yang menjadi pemicu untuk menarik dukungan terhadap pemerintah" (Media Indonesia, 2 November 2006).

Kedua, pengangkatan Marsillam Simandjuntak sebagai Ketua UKP3R oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

> "Ketidaksetujuan pada Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi lebih kepada sosok ketuanya, yakni Marsillam Simandjuntak. Pasalnya, mantan sekretaris kabinet pada masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid itu dianggap sebagai perancang pembubaran DPR/MPR waktu itu" (Kompas, 7 November 2006).

Ketiga, pembentukan UKP3R yang dirasa tidak diperlukan karena dikhawatirkan akan mengganggu kerja kabinet. "Presiden memang tidak memerlukan institusi apapun untuk menjembatani kinerjanya dengan kabinet, karena di kabinet sendiri sudah ada menko dan wapres, dikhawatirkan UKP3R akan membuat jarak antara presiden dan kabinetnya" (Media Indonesia, 5 November 2006). Dan juga, masalah berlanjut ketika sejumlah pihak menilai bahwa pembentukan UKP3R oleh Presiden SBY ini akan semakin menambah pengeluaran negara yang tidak sedikit jumlahnya.

> Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi atau UKP3R menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pembengkakan atau proliferasi pada birokrasi. Hal ini sangat disayangkan karena dikhawatirkan akan menambah beban negara. Ini diungkapkan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof. Dr. Miftah Thoha.
>
> Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah mengefektifkan saja lembaga yang sudah ada. "Ini yang namanya penyakit proliferasi, yaitu kesukaan membentuk organisasi baru tanpa menganalisis organisasi yang ada, tanpa menguatkan organisasi yang ada. Penyakit ini bukan saja melanda presiden yang sekarang saja, tetapi semua pejabat juga begitu, sejak zaman Soeharto" (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/28/Politikhukum/3054563.htm , 28 Oktober 2006).

Proses panjang pembentukan UKP3R yang tak lepas dari kontroversi mengakibatkan kebingungan Presiden dalam menentukan langkah. Karena sempat menuai pro dan kontra, akhirnya Presiden mengambil kebijakan untuk 'mengendapkan' atau 'membekukan' UKP3R. Maksudnya adalah untuk menunda pengaktifan UKP3R, dengan begitu UKP3R tidak akan bekerja dahulu sebagaimana mestinya. Selain agar suasana tidak kian memanas, dalam masa rehat tersebut Presiden akan kembali mengkaji ulang unit kerja yang dibentuknya itu dan

[illegible] akan semakin jelas dan tidak simpang siur

Kesepakatan penundaan tersebut adalah hasil dari pertemuan 'empat mata' antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres di Istana Presiden, Jumat (3/11). Hasyim Muzadi yang usai bertemu dengan wapres, memastikan tim bentukan baru itu tidak akan aktif dalam waktu dekat. Namun, sampai saat ini belum ada rencana untuk dibubarkan, tapi sudah dibekukan alias tidak jalan (Media Indonesia, 5 November 2006).

Setelah lembaga baru itu memicu kontroversi, Presiden SBY mengambil langkah untuk merumuskan kembali tata kerja UKP3R. "Di sini disadari adanya persoalan dengan sosialisasi dan pengaturan hubungan kerja yang berkaitan dengan kabinet. Karena itu, saat ini sedang disusun tata kerja UKP3R untuk menunjang efektivitas pekerjaan kabinet secara keseluruhan, termasuk tugas dan pekerjaan teknis dari UKP3R itu sendiri", kata Andi Mallarangeng (Media Indonesia, 7 November 2006).

Dan selang beberapa hari kemudian, akhirnya Presiden memantapkan langkahnya dengan tetap mempertahankan UKP3R sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut tidak lain adalah agar UKP3R dapat segera bekerja, serta Presiden SBY ingin agar polemik tentang UKP3R segera dihentikan supaya tidak berkepanjangan dan semakin melebar, sebab pembentukan tim kerja presiden ini telah menyita banyak perhatian serta menuai kontroversi. Selain itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga ingin menguatkan posisi dan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk membentuk suatu tim/unit kerja, selama hal tersebut memang dibutuhkan demi kelangsungan kinerja presiden dan keberadaannya tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertahankan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi atau UKP3R melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006.

Presiden mengatakan, pembentukan UKP3R dengan lima tugasnya adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan untuk memenuhi janji perubahan kepada rakyat. Lima tugas UKP3R seperti ditegaskan Presiden adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem

berita-berita tentang proses panjang pembentukan UKP3R berikut kontroversi yang menghiasinya. Misalnya, berita yang diturunkan *Media Indonesia* tanggal 2 November 2006 dengan headline "16 DPD Golkar akan Evaluasi SBY" dapat dimaknai sebagai bentuk kekecewaan terhadap presiden SBY selama masa pemerintahannya. Ditambah dengan adanya masalah tentang ketidaktahuan Wapres Jusuf Kalla perihal pembentukan UKP3R, sehingga memicu reaksi keras dari para kader dan anggota Golkar. Di sini *Media Indonesia* lebih banyak mengambil setting dan sumber berita dari pihak partai Golkar. Kemudian pada tanggal 5 November 2006 *Media Indonesia* memberitakan tentang dibekukannya UKP3R oleh Presiden SBY dengan maksud untuk menonaktifkan kerja UKP3R, yang terlihat dari headline "UKP3R Dibekukan". Dalam hal sumber berita, *Media Indonesia* cenderung menyorot keterangan dari Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan unit kerja presiden tersebut, dan keseluruhan isi berita yang ditampilkan merupakan hasil wawancara dengan Hasyim. Dengan pola pemberitaan semacam itu terlihat bahwa *Media Indonesia* ingin menyatakan pemberontakan sekaligus penolakannya terhadap UKP3R.

Hal ini berbeda dengan SKH *Kompas* yang dalam pemberitaannya menyatakan dukungannya terhadap UKP3R. Seperti misalnya pada tanggal 2 November 2006, sama halnya dengan *Media Indonesia*, *Kompas* juga mengusung masalah UKP3R yang kabarnya akan menjadi topik pembahasan pada Rapimnas Golkar, terlihat dari headline "UKP3R Dibawa ke Rapimnas Golkar". Di sini selain memberitakan tentang sikap kontra pihak Golkar, *Kompas* juga mengimbanginya [illegible] dukungan terhadap UKP3R oleh anggota DPD Sarwono

Kusumaatmaja yang dulunya adalah Sekjen Golkar, yang menyebutkan bahwa pembentukan UKP3R tersebut sepenuhnya merupakan hak presiden, dan dengan dibentuknya UKP3R akan sangat membantu presiden dalam membantu tugasnya. Kemudian pada berita tanggal 7 November 2006 dengan headline "UKP3R Kewenangan Konstutisional Presiden", *Kompas* kembali menuliskan dukungannya terhadap pembentukan UKP3R oleh Presiden SBY. Bahwa seorang presiden berhak untuk membentuk unit kerja apapun sesuai dengan kapasitasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Berikut beberapa berita yang diturunkan oleh kedua media tersebut :

Tabel 1.1. Berita Media Indonesia tentang UKP3R

Tanggal	Judul Berita
2 November 2006	16 DPD Golkar akan Evaluasi SBY
5 November 2006	UKP3R Dibekukan

Sumber : *Media Indonesia*, yang disusun kembali oleh peneliti

Tabel 1.2. Berita Kompas tentang UKP3R

Tanggal	Judul Berita
2 November 2006	UKP3R Dibawa ke Rapimnas Golkar
7 November 2006	UKP3R Kewenangan Konstitusional Presiden

Sumber : *Kompas*, yang disusun kembali oleh peneliti

Dari beragam berita yang disajikan oleh kedua media tersebut kemudian menimbulkan opini publik yang majemuk mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), hal tersebut tak lain disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang dan pembingkaian atas realitas UKP3R antara SKH *Media Indonesia* dan *Kompas*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari paparan pada latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana SKH *Media Indonesia* dan *Kompas* membingkai *(framing)* pemberitaan tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)?
2. Bagaimana perbedaan antara SKH *Media Indonesia* dan *Kompas* dalam membingkai *(framing)* pemberitaan tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana *Media Indonesia* dan *Kompas* dalam membingkai *(framing)* pemberitaan tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R).
2. Mengetahui bagaimana perbedaan antara SKH *Media Indonesia* dan *Kompas* dalam membingkai *(framing)* pemberitaan tentang Unit Kerja

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan kajian bagi yang meminati studi Analisis Framing. Analisis framing berkembang dari pandangan konstruksionis yang melihat bagaimana media membentuk dan mengkonstruksi realitas. Peristiwa yang sama bisa diberitakan berbeda oleh tiap media.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran khalayak untuk lebih mengetahui proses bagaimana berita itu disajikan dan dapat memahami bagaimana cara serta strategi yang digunakan media dalam mengemas berita.

E. KERANGKA TEORI

E.1. Komunikasi sebagai Produksi Pesan dan Makna

John Fiske melihat realitas dapat dipahami dengan dua cara. *Pertama,* paradigma yang melihat komunikasi sebagai proses transmisi pesan, yang disebut juga sebagai pandangan positivistik. *Kedua,* komunikasi dilihat sebagai proses produksi pesan dan pertukaran makna atau disebut juga pendekatan konstruksionisme.

> *"The structure of this reflects the fact that there are two main schools in the study of communication. The first sees communication as the transmission of messages. It is concerned with how senders and receivers encode and decode... the second schools sees communication as the production and*

with people in order to produce meanings. That is, it is concerned with the role of texts in our culture" (Fiske, 1990a : 2).

"Susunan buku ini menggambarkan fakta-fakta bahwa ada dua paradigma besar dalam ilmu komunikasi. Pertama, komunikasi dilihat sebagai proses pengiriman pesan, ini berhubungan dengan bagaimana pengirim dan penerima pesan mengirim dan menerima pesan... kedua, ilmu komunikasi dilihat sebagai produksi dan pertukaran makna. Ini berhubungan dengan bagaimana pesan-pesan atau teks berinteraksi dengan khalayak dalam produksi makna, untuk itu titik perhatiannya dengan aturan teks itu dalam budaya kita".

Paradigma positivis melihat komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan. Di sini, komunikasi dilihat sebagai suatu proses bagaimana pesan terkirim dari pengirim ke penerima dan proses yang terjadi dalam pengiriman tersebut.

Komunikasi transmisi didasarkan pada konteks interpersonal, di mana konsentrasi utamanya terletak pada bagaimana proses yang terjadi selama komunikasi berlangsung. Oleh karena itu, proses penyampaian pesan berjalan secara linier, meskipun dalam model tersebut juga terdapat *feedback*. Model ini berasumsi bahwa semua proses komunikasi berjalan layaknya komunikasi interpersonal. Contoh yang sederhana, ketika kita berbicara di telepon atau ketika sedang menyaksikan siaran televisi, dalam hal ini kita bertindak sebagai penerima (*receiver*), sehingga pesan yang kita terima tersebut adalah sama dengan pesan apa yang terkirim. Menurut model ini, tantangan terbesar dari proses komunikasi adalah bagaimana mentransmisikan isi pesan dari satu orang ke orang lain dengan sukses (Grossberg, Wartella, dan Whitney, 1998 : 16-17).

Komunikator dilihat sebagai pihak yang aktif, sedangkan komunikan sebagai pihak pasif, sehingga yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana pesan dari komunikator bisa sampai ke komunikan, dan dalam proses ini pesan yang disampaikan dengan yang diterima belum tentu sama, karena dalam proses transmisinya kadang terjadi gangguan atau *noise* yang dapat mengakibatkan tidak akuratnya pesan.

Secara umum model komunikasi transmisi menyertakan pengirim *(sender)*, penerima dan medium melalui mana pesan-pesan dikirimkan. Gangguan (*noise*) adalah sesuatu yang terjadi di antara pengiriman tersebut. Dalam

konteks media cetak, medium adalah percetakan yang menghasilkan suatu surat kabar atau media cetak, pengirim *(sender)* adalah wartawan atau editor dan penerima pesan adalah setiap individu yang membaca media cetak tersebut. Sedangkan *noise* atau gangguan terjadi di antara proses tersebut, gangguan tersebut bisa terjadi dikarenakan oleh tulisan yang buram sehingga tidak dapat dibaca, salah penulisan sumber berita, salah ketik dan lain-lain. Penggambaran proses komunikasi seperti ini terlihat *mekanistis* dan *simplistik.* Ketika komunikasi berlangsung, individu yang mengirim sandi *(code)* dan proses komunikasi pada dasarnya adalah proses penyandian pesan agar dapat diterima dan dipahami oleh individu penerima. Sedangkan proses menerima pesan pada dasarnya adalah proses mengurai sandi *(decode)* dan menyandi ulang agar dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan pengirim (Lewis dan Slade dalam Eriyanto, 2002 : 38-39).

Lain halnya dengan paradigma konstruksionisme yang melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Titik fokusnya adalah bagaimana pesan diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan tersebut secara aktif ditafsirkan oleh individu penerima (Eriyanto, 2002 : 40).

Penyampaian pesan bukan hanya dipahami sebagai sebuah pesan yang disampaikan dari A ke B saja, tetapi pesan sudah dipengaruhi oleh realitas yang berada di luar pesan itu. Pesan tidak dilihat secara paralel atau linier semata tapi pesan itu sudah dinamis, di mana ada pengaruh lain yang membuat pemahaman tentang pesan menjadi beragam.

> *"The message, then, is not something sent from A to B, but an element in a structured relationship whose other element include external reality and the producer/reader. Producing and reading the text are seen as parallel, it not idential, processes in that they occupy the same place in the structured relationship. We might model this structure as a triangle in which the arrows represent constant interaction; the structure is not static but a dynamic practice" (Fiske, 1990a.: 3-4).*

> "Pesan, dengan demikian bukanlah sesuatu yang dikirim dari A ke B, tetapi sebagai bagian dalam struktur hubungan di antara bagian lain realitas luar dan pencipta/pembacanya. Menciptakan dan membaca teks tidak semata secara paralel, jika tidak serupa, proses itu menempati tempat yang sama dalam

mana anak panah menunjukkan interaksi yang konstan hubungan ini tidak statis tapi sebuah praktek yang dinamis".

Gambar 1.1

Proses Interaksi Pesan

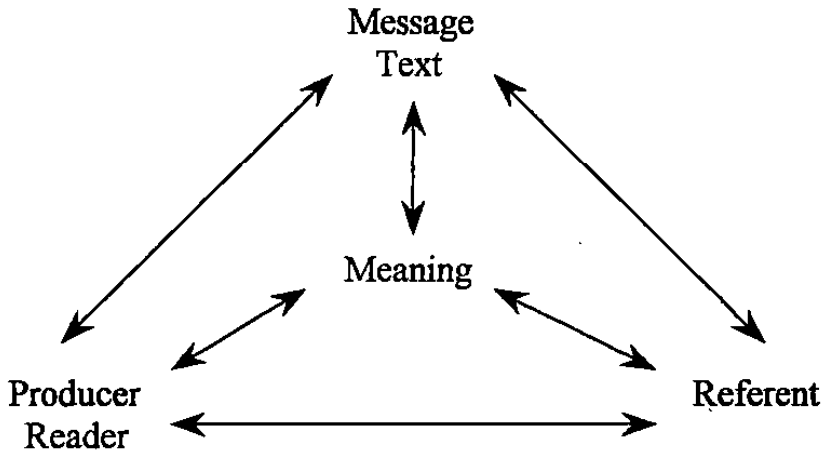

Sumber : John Fiske. *Introduction to Communication Studies.* (1990a : 4)

E.2. Paradigma Konstruksionisme

Dalam kajian ilmu komunikasi secara umum ada dua paradigma yaitu pandangan efek media dan pendekatan konstruktivisme.

Pandangan efek media adalah paradigma yang melihat komunikasi sebagai sebuah efek media dalam mentransmisikan pesan, yang disebut juga sebagai paradigma positivisme. Sedangkan pendekatan konstruktivisme adalah paradigma yang melihat komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna (Fiske, 1990b : 8).

Pendekatan konstruksionis tidak melihat media sebagai saluran penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, melainkan sebagai sebuah proses dinamis yang menekankan kepada politik pemaknaan dan proses bagaimana

seseorang membuat gambaran tertentu tentang realitas, sebagaimana diketahui bahwa terdapat dua karakteristik dalam pendekatan konstruksionis.

> *Pertama*, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan oleh seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan ini memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan (Crigler dalam Eriyanto, 2002 : 40-41).

Dalam paradigma konstruksionis, pesan tidak dianggap sebagai *mirror of reality* (cermin dari realitas) di mana sebuah fakta ditampilkan secara apa adanya. Dalam menyampaikan pesan, seorang komunikator dengan realitas yang ada akan menampilkan fakta tertentu kepada komunikan, dan memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa. Pesan bukanlah sesuatu apa yang dikirimkan, tetapi apa yang dikonstruksi dan apa yang dibaca. Makna merupakan produk konstruksi dan interaksi antara pengirim dan penerima.

Paradigma konstruksionisme mempunyai empat sifat, yaitu :

1. Secara antologis bersifat relatif dengan memahami realitas merupakan hasil dari konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
2. Secara epistemologi bersifat subyektif. Maksudnya pemahaman tentang sesuatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.
3. Secara metodologis bersifat reflektif dialektik. Pendekatan konstruksionis menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui sebuah metode kualitatif, peneliti terlibat langsung dan berinteraksi dengan objek yang diteliti.
4. Secara axiologis pendekatan ini memandang nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai *passionate participant*. Fasilitator yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial (Salim, 2006 : 71).

E.3. Konstruksi Realitas Sosial

E.3.1. Media dan Konstruksi Realitas Sosial

Realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang ditakdirkan dari yang kuasa, akan tetapi relitas terjadi karena dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Oleh karenanya setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu relitas (Berger dalam Eriyanto, 2002 : 15).

> Konsep konstruksionisme pertama kali dikenalkan oleh ahli sosiolog interpretatif, Peter L Berger dan Thomas Luckman, dan kemudian dikenal sebagai konstruksi sosial. Konstruksi sosial digambarkan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang dimana individu menciptakan terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subyektif (Bungin, 2001 : 10).

Realitas sosial itu tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Individu mengkonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksikannya ke dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan subjektifitas individu lain dalam institusi sosialnya.

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama yang merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang realitas.

> Dalam media massa, keberadaan bahasa bukan sebagai alat untuk menggambarkan sebuah realitas, melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas –realitas media– yang akan muncul di benak khalayak. Dengan menggunakan bahasa, media dapat mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru; memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa (Hamad, 2004 : 12).

Bahasa menjadi bagian paling penting dalam konstruksi realitas, sebab tanpa

yang kita ingin orang lain mengetahuinya. Untuk itulah bahasa menjadi punya makna ketika bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) dan bahasa non verbal (gambar, foto, grafik, dll) dapat mengungkapkan apa yang kita inginkan. Dan setiap kata, angka, atau simbol lain tersebut yang dipakai untuk menyampaikan pesan tentu mengandung makna. Begitu juga, rangkaian antara satu kata dengan kata lain akan menghasilkan suatu makna, sehingga wacana yang dihasilkan bisa menimbulkan makna tertentu.

Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini, bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan realitas.

Gambar 1.2

Hubungan Antara Bahasa, Realitas, dan Budaya

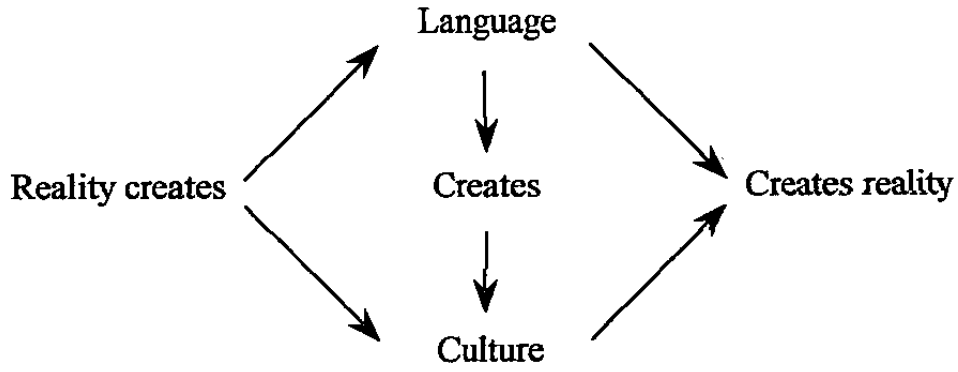

Sumber : Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (2004 : 13)

Budaya juga berpengaruh pada realitas sosial yang coba untuk dibahasakan. Artinya, seseorang akan memahami bahasa yang dihadirkan media massa dengan dipengaruhi nilai-nilai dan latar belakang budaya individu tersebut. Realitas yang disajikan media oleh massa akan dimaknai berbeda oleh setiap individu karena pengaruh budaya tadi. Dua individu dengan latar belakang budaya yang berbeda akan mempunyai pandangan tersendiri dalam memahami sebuah teks.

Dalam kehidupan media massa, bahasa menjadi unsur yang potensial karena hanya melalui bahasa para pekerja media menghadirkan hasil reportasenya berupa berita kepada khalayak. Dengan bahasa, mereka secara tidak langsung telah ikut membentuk atau mengkonstruksi pemahaman/pemaknaan dalam benak masyarakat. Dalam konteks berita, sebuah teks berita dipandang sebagai konstruksi atas realitas, karena suatu peristiwa yang sama berpotensi untuk dikonstruksi secara berbeda oleh berbagai media. Wartawan bisa saja mempunyai pandangan berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan hal itu dapat dilihat dari bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa tersebut untuk ditulis ke dalam bentuk berita.

Proses konstruksi realitas :

> *Pertama,* eksternalisasi. Eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental ataupun fisik. *Kedua,* objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. *Ketiga,* internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Berger dalam Eriyanto, 2002 : 14)

E.3.2. Media dan Pendefinisian Realitas

Bagaimana mendefinisikan realitas tidak jauh dari subjektifitas wartawan yang meliput di lapangan. Pendefinisian ini berkaitan erat dengan bagaimana wartawan memandang peristiwa yang terjadi, bagaimana pilihan kata-kata yang akan dibahasakannya dalam berita, atau pilihan gambar serta foto yang akan memperkuat prasangka khalayak pada suatu peristiwa yang akan diliput. Kemudian yang tidak dapat ditinggalkan adalah bagaimana pemilihan narasumber yang akan memperkuat dugaan pada peristiwa yang terjadi.

Media mempunyai andil besar dalam mendefinisikan realitas. Sebuah berita tidak ditulis sama persis dengan peristiwa sebenarnya yang terjadi di lapangan, akan tetapi berita dibentuk melalui proses aktif dari pembuat berita dan sudah melalui berbagai proses yang panjang serta dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada akhirnya, setiap pemberitaan yang dimuat membawa konsekuensi berbeda dalam pendefinisian realitas.

Ada lima faktor yang mempengaruhi isi pemberitaan media dalam mendefinisikan realitas sosial :

> *Pertama,* faktor individual. Faktor ini menitikberatkan pada individu jurnalis. Ini berhubungan dengan latar belakang profesionalisme pengelola media serta latar belakang kehidupan wartawan seperti jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, orientasi keagamaan, dan budaya akan mempengaruhi pola pemberitaan (Shoemaker dan Reese, 1996 : 102).

Sebuah berita dipengaruhi oleh aspek-aspek personal dari pengelola media untuk mempertimbangkan peristwa mana yang akan diliput dan diberitakan. Aspek personal akan mempengaruhi bagaimana pengelola menyajikan suatu berita. Latar belakang kelamin akan menentukan gambaran bagaimana berita itu disajikan

Majalah Femina, misalnya, sebagai majalah untuk perempuan dewasa cenderung memberitakan perempuan secara baik dan akan berpihak pada perempuan. Jika masalah kekerasan terhadap perempuan terjadi oleh laki-laki maka setiap berita akan dikemas dari sudut pandang gender. Orientasi ini tidak mengherankan sebab dalam dapur redaksi mereka, sebagian besar dari wartawan yang ada adalah perempuan yang peka dan dapat merasakan apa yang perempuan ingin tahu.

> *Kedua,* rutinitas media. Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk melalui proses dan tangan siapa saja sebelum sampai ke proses cetak (Sudibyo, 2001 : 8).

Pada umumnya setiap media mempunyai ukuran tersendiri tentang kriteria kelayakan berita, dan ukuran tersebut telah menjadi sebuah rutinitas di dalam media untuk mengelola pemberitaan. Sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana berita diproduksi, rutinitas media pada akhirnya akan berpengaruh pada wujud akhir sebuah berita. Dan jika media menampilkan aspek tertentu bukan berarti media tersebut memainkan peran negatif dalam proses pembentukan berita untuk mengelabui publik. Hal demikian bisa saja terjadi, namun semua proses seleksi terjadi karena rutinitas kerja keredaksionalan yang dianggap sebagai suatu bentuk rutinitas organisasi media. Kemudian disinilah seorang redaktur memegang sebuah kendali pemberitaan, redaktur memiliki otoritas penuh atas pemilihan suatu peristiwa yang layak atau tidak layak untuk dijadikan sebuah berita.

> *Ketiga,* level organisasi. Sebuah pembentukan berita dipengaruhi oleh institusi media. Wartawan, editor, layouter dan fotografer, adalah bagian kecil dari institusi media. Pengelola media dan wartawan bukanlah orang tunggal yang menentukan sebuah berita, lebih dari itu, ada aspek lain yang mempengaruhi, seperti bagian pemasaran, pengiklan dan pemodal

Suatu peristiwa oleh satu media lebih sering dimuat karena dapat mendongkrak pemasaran, sementara media lain tidak memuatnya karena peristiwa itu berhubungan dengan pemilik modal. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian dari media tersebut tidak mesti selalu sejalan, bahkan bisa saja terjadi pertentangan antar bagian dalam organisasi media. Sebab setiap bagian mempunyai target, strategi dan tujuan yang berlainan. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi pertentangan antara bagian redaksi dan bagian sirkulasi atas suatu peristiwa. Redaksi memutuskan untuk memuat berita tersebut karena pertimbangan-pertimbangan dari sisi jurnalisme, sementara sirkulasi tidak setuju atas pemuatan berita tersebut karena dapat mengakibatkan jatuhnya pemasaran, dan sebaliknya menginginkan penonjolan berita tertentu untuk menaikkan angka pemasarannya. Setiap organisasi media selain mempunyai banyak bagian namun juga tetap mempunyai tujuan dan filosofi tersendiri yang mempengaruhi bagaimana proses kerja wartawan di lapangan, di mana idealisme dan aturan-aturan sangat menentukan bagaimana sikap, tindakan dan aturan main bagi setiap anggota institusi media.

Keempat, ekstra media. Level ini berhubungan dengan lingkungan di luar media yang sedikit banyak telah mempengaruhi pemberitaan media. Ada tiga faktor di luar lingkungan media yang mempengaruhi pemberitaan yaitu :

Faktor *pertama*, sumber berita. "Sumber berita tidak dilihat sebagai pihak yang netral dalam memberikan informasi berita. Sumber berita tentu saja memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik bagi dirinya, dan *mengembargo* informasi yang tidak baik bagi dirinya" (Shoemaker dan Reese, 1996 : 210). Sumber berita juga mempunyai kepentingan

untuk mempengaruhi media dengan alasan-alasan tertentu, misalnya untuk memenangkan opini publik atau membentuk citra positif agar khalayak turut aktif mendukung argumentasinya. Informasi yang diberikan tentu dengan citra yang baik tentang dirinya tanpa ada kesalahan, dan sebaliknya ia akan memberikan argumentasi-argumentasi yang akan menjatuhkan lawan dengan memaparkan kesalahannya. Dibalik semua ini, pengelola media tidak sadar dengan apa yang dilakukan oleh sumber berita, bahkan memberikan ruang yang cukup untuk memberitakan kebenaran versi sumber tadi. Pola pemberitaan semacam ini kerap kali dilakukan oleh media dengan alasan oplah media tersebut, tetapi yang tidak disadarinya adalah saat media ternyata menjadi corong informasi dari sumber subjektif tersebut.

Faktor *kedua,* sumber penghasilan media. Untuk mempertahankan kelanggengannya, sebuah media membutuhkan dana yang dalam hal ini adalah iklan. "Untuk bertahan hidup kadang kala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Misalnya media tidak diperkenankan untuk memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan iklan" (Sudibyo, 2001 : 11). Akibatnya pemberitaan akan tunduk dan patuh terhadap pengiklan, kemudian yang terjadi adalah subjektifitas dan kebebasan media akan terancam. Bagaimanapun media tidak akan memiliki opsi lain, dan apabila keburukan dari salah satu pengiklan dijadikan bahan pemberitaan kepada publik, maka resiko terburuk yang harus siap diterima adalah pengiklan tidak akan segan-segan untuk *mengembargo* media tersebut dengan

Faktor *ketiga*, pihak eksternal media. Misalnya pemerintah dan lingkungan bisnis.

> Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Di negara yang otoriter misalnya, pengaruh pemerintah menjadi faktor dominan dalam menentukan berita apa yang disajikan. Ini terjadi karena dalam negara yang otoriter, negara menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan (Sudibyo, 2001 : 12).

Sehingga setiap penerbitan media harus mengikuti berbagai aturan dan batasan yang ditentukan pemerintah. Keadaan seperti ini tentu saja berbeda dengan negara demokratis, di mana tidak ada campur tangan dari pemerintah, justru yang mendominasi adalah pengaruh dari lingkungan pasar dan bisnis.

> *Kelima*, level ideologi. Dalam konteks ini, ideologi diartikan sebagai kerangka pikir yang dipakai oleh setiap individu untuk melihat realitas dan bagaimana menghadapinya. Ideologi adalah sesuatu yang abstrak, yang berhubungan dengan konsepsi individu dalam menafsirkan suatu realitas. Ideologi yang abstrak diartikan sebagai siapa yang berkuasa dan siapa yang menentukan bagaimana media tersebut akan dipahami oleh publik (Shoemaker dan Reese, 1996 : 251).

Misalnya, pada era Orde Baru pemerintahan Soeharto, Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai yang terlarang. Maka, dengan sendirinya pengelola media akan menyesuaikan dengan keadaan zaman dan pandangan masyarakat yang telah mendarah daging tentang PKI ini dalam sebuah pemberitaan yang turut mendukung opini masyarakat. Jarang terjadi media berani menentang arus dari apa yang menjadi keyakinan dalam masyarakat. Jadi media akan mempertimbangkan bagaimana aspek sosial dan politik di mana media hadir. Misalnya, bisa 'memaksa' berita apa yang ditulis dan bagaimana berita itu harus ditulis. Aspek politik seperti otoriterisme negara, meskipun berada di luar institusi

E.4. Berita dalam Paradigma Konstruksionisme

Paradigma konstruksionis berpendapat bahwa sebuah berita itu merupakan konstruksi dari realitas.

> Menurut pandangan konstruksionis, berita itu ibarat sebuah drama. Berita tidak menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Berita adalah hasil konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media (Carey dalam Eriyanto, 2002 : 25).

Layaknya sebuah drama, dalam sebuah berita pasti terdapat pihak-pihak yang didefinisikan sebagai pahlawan, dan ada pula pihak yang didefinisikan sebagai musuh. Semua hal tersebut dibentuk layaknya sebuah drama yang dipertontonkan kepada publik. Dan realitas yang kemudian dibentuk dan hadir menjadi sebuah berita tersebut tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Realitas yang sama bisa menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. Berita yang disajikan kepada khalayak merupakan hasil dari konstruksi kerja jurnalis. Semua proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, sampai pengeditan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir dalam kehidupan khalayak.

Sebuah berita juga bersifat subjektif, karena setiap berita yang disajikan merupakan hasil kerja konstruksi kerja wartawan yang tak dapat terlepas dari subjektifitas si pembuat berita tersebut.

> Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya apa yang dia lihat. Etika, moral atau keyakinan pada kelompok atau nilai-nilai tertentu adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas. Wartawan menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, tetapi

Dalam menulis berita, wartawan juga bertindak sebagai agen konstruksi realitas. Penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan sumber lain, liputan yang hanya satu sisi, tidak berimbang, merugikan pihak lain, dan memihak satu kelompok, merupakan hal yang biasa dalam sebuah berita. Seorang wartawan tidak bisa menyembunyikan keberpihakan dan pilihan moralnya dalam menyusun berita. Sehingga, realitas yang terbentuk dalam pemberitaan bukanlah apa yang terjadi dalam dunia nyata, melainkan relasi antara wartawan dengan sumber dan lingkungan sosialnya.

Dan sebuah realitas yang ditampilkan dalam berita tentu tidak lain adalah hasil dari konstruksi.

> Realitas hadir , karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas juga tercipta lewat konstruksi sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas itu bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda (Gans dalam Eriyanto, 2002 : 19).

Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan dari berita. Fakta/realitas pada dasarnya dikonstruksi. Karena fakta itu ditampilkan secara simbolik, maka realitas tergantung pada bagaimana ia dilihat dan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi. Sebuah fakta yang sama bisa menghasilkan realitas yang berbeda-beda ketika ia dilihat dan dipahami dengan cara yang berbeda.

Sebuah berita yang disajikan kepada pembaca tidak hanya menggambarkan realitas dan menunjukkan pendapat sumber berita semata, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Apa yang tersaji dalam berita

media juga merupakan agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.

E.5. Media dan Konflik

Mengangkat peristiwa konflik menjadi suatu berita adalah suatu hal yang lazim dalam tradisi jurnalisme, sebab konflik merupakan realitas yang mengandung nilai berita tinggi (*news values*) sehingga mampu menarik perhatian audiens. Konflik tidak selalu bersifat negatif dan penuh kekerasan, sebaliknya suatu konflik bisa berarti positif dan konstruktif jika dikelola dengan baik dan membuka kesempatan bagi adanya perubahan. Namun satu hal yang pasti bahwa konflik bersifat kontroversial dan selalu melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih terkait dengan suatu kepentingan, perebutan status bahkan kekuasaan.

Bagaimanapun kecilnya sebuah konflik yang terjadi jika diliput dan diberitakan oleh media massa akan berubah menjadi konflik yang lebih besar. Tanpa media massa, konflik hanya akan menjadi berita kecil yang terbatas jangkauannya. Realitas media dalam memberitakan konflik bukanlah persoalan sederhana. Efek pemberitaan konflik melalui media massa memiliki dua sisi ambivalen : mempertajam atau sebaliknya, mereduksi konflik.

> Stanley melihat tiga posisi media dalam memberitakan konflik. *Pertama*, media sebagai *issue intensifier* : media berposisi memunculkan konflik kemudian mempertajamnya. Dalam posisi ini, media mem-*blow up* realitas menjadi isu sehingga seluruh dimensi konflik menjadi transparan. *Kedua*, media sebagai *conflict diminisher*, media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis. *Ketiga*, media berfungsi sebagai pengarah konflik (*conflict resolution*), yakni menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Lewat pemberitaan di media, pihak yang terlibat diharapkan

> memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan serta mengevaluasi ulang sikap apriori yang semula terbentuk (Stanley dalam Rahayu, 2006 : 131 – 132).

Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa media selalu memiliki kepentingan sendiri di dalam memberitakan sebuah konflik yang tengah terjadi dalam masyarakat. Bisa jadi, demi kepentingan bisnis untuk menaikkan tirasnya media kemudian menjual isu-isu panas mengenai konflik yang terjadi di masyarakat termasuk kepentingan politik. Dalam hal ini media bukanlah institusi yang terlepas dari prasangka, subjektivitas ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Media termasuk di dalamnya pemilik media berhak menentukan kebijaksanaan terhadap suatu berita. Akibatnya, pola pemberitaan bisa dibentuk berdasarkan ragam kepentingan, terutama berkaitan dengan ekonomi dan politik media. Kepentingan semacam ini mendorong wartawan untuk menunjukkan keberpihakannya, sehingga pada akhirnya melahirkan liputan-liputan yang bias, tidak berimbang, tidak adil, bahkan memperparah situasi konflik. "Keberpihakan yang paling mendasar terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung (*favourable*) ataupun perasaan tidak mendukung (*unfavourable*)" (Prakoso dalam Rahayu, 2006 : 137). Sebuah berita yang mengutip satu atau lebih narasumber yang mempunyai pendapat positif tanpa memasukkan narasumber lain yang bereaksi negatif terhadap suatu konflik dianggap bersifat memihak, dan sebaliknya. Namun sebuah berita dipandang netral jika memasukkan kedua narasumber yang berargumen positif ataupun negatif tanpa memandang perbandingan jumlah narasumber yang berbeda tersebut. Dan secara umum pemilihan narasumber tertentu bisa dilihat sebagai keberpihakan atau sikap media

Dalam peristiwa pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) juga menuai kontroversi yang berujung pada konflik antar individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana konflik tersebut dimaknai oleh media, bagaimana media mengambil sikap di tengah perseteruan tersebut. Di sini terdapat dua hal yang diperdebatkan, yakni apakah keberadaan UKP3R tersebut penting dan diperlukan oleh presiden ataukah pembentukan unit kerja baru ini hanya sebagai strategi unik presiden saja demi menyelamatkan citra presiden yang memburuk di mata rakyat akibat gagalnya kinerja Kabinet Indonesia Bersatu. Baik Media Indonesia ataupun Kompas dalam menuliskan peristiwa ini mempunyai komposisi masing-masing dalam konten beritanya. Media Indonesia yang dikomandoi oleh Surya Paloh yang notabene Ketua DPP Partai Golkar ini dengan gaya penulisan yang berani dan kritis menunjukkan penolakannya terhadap UKP3R serta sikap memberontak kepada pemerintah khususnya Presiden SBY. Ini disebabkan karena munculnya masalah awal soal tidak dilibatkannya Wapres Jusuf Kalla yang notabene Ketua Umum Partai Golkar di dalam pembentukan UKP3R, sehingga memicu respon keras serta kecaman dari partai tersebut. Sehingga dapat terlihat jelas bahwa latar belakang pemilik media berperan penting dalam pembentukan berita. Lain halnya dengan Kompas di mana pola pemberitaannya lebih berhati-hati dan tidak terlalu tajam, namun lebih menuju kepada sisi kenetralan yang ingin ditunjukkan terhadap kasus UKP3R tersebut. Walaupun secara samar saja namun terlihat bahwa Kompas ingin menuliskan

E.6. Framing Media

Gagasan framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau kepercayaan yang mengorganisir pandangan publik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2001 : 161 – 162).

> Framing pada dasarnya adalah metode untuk melihat cara bercerita *(story telling)* media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang akan dijadikan berita, sehingga cara melihat tersebut berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas sosial. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas, juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002 : 10).

Konsep framing sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi secara khusus sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Dalam memproduksi berita, media tidak begitu saja menulis sebuah peristiwa menjadi berita, tapi media menyeleksi sebuah peristiwa yang kemudian ditulis ke dalam berita sesuai dengan pemahaman dan pemaknaannya terhadap peristiwa tersebut, untuk mengkonstruksi pemikiran khalayak sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Jisuk Woo, ada tiga kategori besar elemen framing :

> *Pertama,* level makro-struktural. Level ini adalah sebagai pembingkaian dalam tingkat wacana, bagaimana peristiwa dipahami oleh media. *Kedua,* level mikro-struktural, yang memusatkan perhatian pada bagian mana dari peristiwa tersebut yang ditonjolkan dan bagian mana yang dilupakan. Elemen mikro-struktural membahas mengenai fakta apa yang disajikan secara menonjol dan fakta mana yang disembunyikan. Pemilihan fakta, angel, narasumber, adalah bagian dari level mikro-struktural ini. *Ketiga,* elemen retoris, yang memusatkan perhatian pada bagaimana fakta ditekankan. Penekanan itu dilakukan dengan pemilihan kata, kalimat, retorika, gambar

> atau grafik tertentu, dengan tujuan untuk meyakinkan khalayak bahwa berita yang disajikan adalah benar (Jisuk Woo dalam Eriyanto, 2002 : 288).

Robert N. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar : seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas/isu tersebut. Dalam prakteknya, media menjalankan framing dengan menonjolkan isu tertentu dengan menggunakan berbagai strategi wacana seperti penempatan headline, bagian depan atau belakang, pengulangan, dll (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999 : 21).

Framing adalah sebuah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang lebih menonjol dan mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih memperhatikan dan mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan menonjol oleh media. Sedangkan aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak.

> Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999 : 21).

Peristiwa yang sama bisa jadi diberitakan berbeda oleh media. Peristiwa kecelakaan pesawat terbang misalnya, bisa dibingkai secara berbeda. Ada media yang membingkai kecelakaan tersebut sebagai peristiwa kecelakaan murni, karena kesalahan teknis atau masalah cuaca. Di lain media ada yang memberitakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat ketidakbecusan pihak pengelola, atau bahkan karena sabotase dan terorisme. Kedua berita tersebut berasal dari satu peristiwa yang sama akan tetapi berita yang tampil berbeda, perbedaan itu terjadi karena peristiwa tersebut dipahami dan dikonstruksikan secara berbeda oleh setiap media.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pembentukan tim kerja presiden oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinamai Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) mendapat sorotan di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Dan isi pemberitaan di media massa tak lain adalah hasil dari konstruksi dari jurnalis pembuat berita.

Berdasarkan latar belakang masalah, kerangka teori, objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu "jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya" (Strauss dan Corbin, 2003 : 4).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruksionisme, yang memiliki pandangan bahwa teks media merupakan hasil dari konstruksi media terhadap realitas. Realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, sebaliknya realitas itu diproduksi" (Carey dalam Eriyanto, 2002 : 19-20).

Paradigma konstruksionisme menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data diperlakukan secara kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah berita-berita yang dimuat pada harian Media Indonesia dan Kompas tentang UKP3R.

Analisis yang bisa digunakan untuk mengungkap konstruksi yang dilakukan media salah satunya adalah analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana realitas dikonstruksi oleh media, bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menuangkannya dalam

bentuk berita untuk kemudian disajikan pada khalayak pembaca. Namun penelitian tidak membandingkan sejauh mana antara konstruksi realitas dengan realitas sebenarnya, tetapi bagaimana konstruksi yang dilakukan oleh media khususnya surat kabar dalam memaknai realitas.

Penelitian ini menggunakan analisis isi teks media dengan menggunakan paradigma konstruksionisme dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pisau analisis data framing.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah dua surat kabar, yakni Media Indonesia dan Kompas, yang memuat berita-berita tentang pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Peneliti mengambil sampel berita sebanyak 4 buah artikel (Kompas tanggal 2 dan 7 November 2006 ; Media Indonesia tanggal 2 dan 5 November 2006) yang dipergunakan sebagai bahan penelitian, karena kedua media cetak tersebut sama-sama membahas tentang proses panjang pembentukan UKP3R termasuk pro dan kontranya. Alasan lain yang mendasari penggunaan kedua media cetak harian tersebut adalah keduanya merupakan surat kabar berskala nasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, ... merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari

dokumen-dokumen yang ada dan catatan yang dimiliki oleh unit analisis, sehingga dapat dimanfaatkan guna memperoleh serta melengkapi data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus (Surakhmad, 1982 : 163). Sebagai data primer dalam penelitian ini, data diambil sebanyak 2 buah berita dari surat kabar harian (SKH) Media Indonesia pada tanggal 2 dan 5 November 2006 serta 2 buah berita di SKH Kompas pada tanggal 2 dan 7 November 2006 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Anwar, 2001 : 35). Guna melengkapi data peneliti juga mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, internet, serta dari surat kabar yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing*, sebuah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media, sehingga hasil akhir yang tampak adalah adanya penonjolan realitas dan aspek-aspek tertentu yang mudah dikenal.

> Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari

peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak (Soesilo dan Wasburn dalam Eriyanto, 2002 : 67).

Penonjolan pada aspek tertentu membuat informasi menjadi lebih bermakna. Peristiwa yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai peluang besar untuk diperhatikan khalayak. Pemberian judul yang bombastis dipergunakan oleh media cetak untuk menarik perhatian khalayak. Penempatan judul yang dijadikan *headline* di halaman muka atau belakang, pengulangan kata, pemberian foto atau gambar adalah salah satu praktek penonjolan dari dimensi seperti yang digambarkan oleh Entman dalam konsep *framing*.

Analisis framing adalah suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita dengan melihat bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus/peristiwa yang diberitakan.

Penelitian ini akan menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena dalam model ini elemen yang digunakan untuk menganalisis data lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan model-model yang lain. Berikut adalah konsep framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk mengungkap sebuah isi realitas isi pemberitaan dalam media cetak.

> Setiap berita memiliki *frame* yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* adalah sebuah ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam bentuk teks secara keseluruhan, karena *frame* berhubungan dengan makna. Pembaca dalam memaknai suatu peristiwa dapat [illegible] dimunculkan dalam teks (Pan dan Kosicki

Perangkat framing yang digunakan Pan dan Kosicki dalam menganalisis teks berita dapat dibagi menjadi empat struktur besar, yakni :

I. Struktur Sintaksis

Struktur Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa –pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa– ke dalam bentuk susunan umum berita.

> Sintaksis dalam pengertian umum adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita – *headline, lead,* latar informasi, sumber, penutup – dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida terbalik – yang dimulai dengan judul *headline, lead,* episode, latar, dan penutup. Sintaksis berguna untuk memberi petunjuk kepada wartawan tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak ke mana berita itu akan dibawa (Eriyanto, 2002 : 257).

> *Headline* merupakan aspek sintaksis yang memiliki tingkat kemenonjolan cukup tinggi, karena menunjukkan kecenderungan suatu berita, dan mempunyai tiga fungsi yaitu mengiklankan berita, meringkaskan atau mengikhtisarkan cerita, dan memperbagus surat kabar (Anwar, 1996 : 11).

Headline memiliki tingkat kemenonjolan yang tinggi sehingga lebih diingat oleh pembaca, dan dapat mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa dimengerti, serta untuk menunjukkan bagaimana wartawan mengkonstruksi isu. *Headline* juga berfungsi menjadi penjelas dalam berita, misalnya tanda tanya untuk menjelaskan sebuah perubahan, tanda kutip untuk menunjukkan adanya jarak perbedaan.

Lead adalah perangkat sintaksis lain untuk menunjukkan perspektif tertentu dari suatu peristiwa yang diberitakan oleh media, dan merupakan

Latar dipakai untuk menyediakan latar belakang hendak ke mana makna teks itu dibawa.

> Ketika menulis berita, seorang wartawan mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Karena itu, latar membantu untuk menyelidiki bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa (Eriyanto, 2002 : 258).

Pengutipan sumber berita dimaksudkan untuk membangun objektivitas. Pengutipan sumber berita menekankan bahwa apa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu.

Pengutipan sumber berita menjadikan perangkat framing yang kuat atas tiga hal antara lain :

> *Pertama*, mengklaim kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Maksudnya adalah bahwa pendapat yang dikutip didukung oleh para ahli yang berkompeten walaupun sebenarnya wartawan mempunyai pendapat sendiri atas suatu peristiwa. *Kedua*, menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. *Ketiga*, mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas, sehingga pandangan tersebut nampak sebagai suatu penyimpangan (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999 : 33).

II. Struktur Skrip

Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa (Sobur, 2001 : 175).

Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita : bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skrip memberikan tekanan

mana yang didahulukan dan informasi mana yang disembunyikan, sehingga bagian yang didahulukan menjadi menonjol, dan sebaliknya bagian yang disembunyikan atau ditempatkan di bagian akhir berita menjadi tidak menonjol dan kurang diperhatikan.

Bentuk umum struktur skrip adalah pola 5 W + 1 H (who, what, when, where, why, and how). Unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi penanda framing yang penting (Eriyanto, 2002 : 260).

III. Struktur Tematik

> Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil (Sobur, 2001 : 176).

Ada beberapa elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik, diantaranya adalah koherensi : pertalian atau jalinan antar kata, proposisi atau kalimat. "Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan menggunakan koherensi, sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan" (Eriyanto, 2002 : 263).

Dalam menulis berita, wartawan mempunyai tema atas suatu peristiwa tertentu. Pembuat teks dapat memanipulasi penafsiran pembaca tentang suatu peristiwa, untuk mensugesti dan meyakinkan khalayak akan kebenaran penulisan berita tersebut, maka wartawan menggunakan strategi elemen wacana sebagai berikut :

Detail. Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh komunikator. Komunikator akan menampilkan informasi yang menguntungkan dirinya, dan sebaliknya komunikator akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit apabila hal itu merugikannya. Informasi yang menguntungkan bagi komunikator tidak hanya ditampilkan secara berlebihan, akan tetapi juga mengalami penambahan detail secara lengkap, detail yang panjang lebar, serta ditambah dengan data-data untuk menonjolkan citra komunikator tersebut kepada pembaca. *Maksud.* Elemen wacana maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas, begitupun sebaliknya, apabila informasi yang merugikan akan diuraikan secara samar, implisit, tersembunyi, eufimistik dan berbelit-belit (Sobur, 2001 : 79).

Nominalisasi. Elemen ini berhubungan dengan pertanyaan apakah komunikator memandang objek sebagai suatu yang tunggal, berdiri sendiri ataukah sebagai suatu kelompok (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999 : 34).

IV. Struktur Retoris

Struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, retoris melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu (Sobur, 2001 : 176).

Retoris juga dipakai wartawan untuk membangun citra, meningkatkan kemenonjolan pada bagian tertentu, dan sebagai pertanda bahwa berita yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran (Eriyanto, 2002 : 264).

Terdapat empat macam elemen retoris yang dipakai wartawan diantaranya adalah sebagai berikut :

Leksikon. Elemen ini menunjuk pada pemilihan dan pemakaian kata-kata

> Pilihan kata yang dipakai secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas. Kata "meninggal" misalnya, mempunyai kata lain : mati, tewas, gugur, terbunuh, menghembuskan nafas terakhir, dan sebagainya. Peristiwa yang sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Peristiwa terbunuhnya mahasiswa Trisakti dapat disajikan dengan kata-kata "pembunuhan", "kecelakaan", atau bahkan "pembantaian" (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999 : 43).

Grafis. Elemen ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat berbeda dari tulisan lain. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pada khalayak pentingnya bagian tersebut.

> Bagian yang dibuat berbeda adalah bagian yang dipandang penting oleh komunikator, di mana ia menginginkan khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut. Misalnya pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah *caption, raster,* grafik, tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan.
> Elemen grafik memberikan efek kognitif, yang mengontrol perhatian dan ketertarikan secara intensif dan menunjukkan apakah informasi itu dianggap penting dan menarik sehingga harus difokuskan (Eriyanto, 2002 : 256).

Pengandaian. Elemen ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks (Sobur, 2001 : 79). Pengandaian hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya, oleh karenanya tidak perlu untuk diragukan. Pengandaian adalah strategi yang dapat memberi kesan berbeda ketika diterima pembaca.

Metafora. Dalam suatu wacana seorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok dalam teks, tetapi juga kiasan atau ungkapan. Metafora dimaksudkan sebagai ornamen dari suatu berita. Pemakaian

teks. Metafora dipakai oleh wartawan sebagai landasan berfikir, alasan pembenar atas pendapat tertentu kepada publik (Sobur, 2001 : 84).

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki membuat susunan perangkat yang digunakan dalam framing ke dalam skema framing, yang dikenal dengan nama skema framing model Pan dan Kosicki, sebagai berikut :

Gambar 1.3

Skema Perangkat Framing Pan dan Kosicki

Struktur	**Perangkat Framing**	**Unit yang Diamati**
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Nominalisasi antar kalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti	Paragraf, proposisi
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber : Alex Sobur. *Analisis Teks Media*, (2001 :176)

5. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini, peneliti akan membagi ke dalam empat bab, di mana bab I akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) diterjemahkan oleh media massa, hal ini lah yang menjadikan latar belakang dan rumusan masalah dalam skripsi ini. Untuk metode penelitian yang digunakan, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan analisis *framing*, yang merupakan sebuah perangkat teori untuk membedah pemberitaan di setiap media massa. Dengan menggunakan teori *framing* akan diketahui bagaimana suatu media membangun sebuah konstruksi peristiwa yang kemudian berkembang menjadi sebuah wacana di tengah masyarakat. Pada bab II peneliti menuliskan profil media yang menjadi objek penelitian yaitu Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Kompas, mulai dari sejarah berdiri hingga perkembangannya saat ini. Kemudian pada bab III akan menjelaskan analisa data yang bahannya diperoleh dari kedua media cetak tersebut. Pada analisa data ini, peneliti menggunakan pisau analisis *framing* untuk mengetahui bagaimana media cetak tersebut dalam mengkonstruksi peristiwa yang kemudian dijadikan sebuah berita untuk dikonsumsi publik. Skripsi ini akan diakhiri pada bab IV yang terangkum dalam kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan, skripsi ini menjelaskan hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti, kemudian pada sub bab saran, peneliti berusaha memberikan alternatif penilaian kepada media tersebut dan pembaca skripsi